

## *Factors influencing limited repository access in academic libraries* Faktor-faktor yang memengaruhi pembatasan akses repositori perpustakaan perguruan tinggi

Araf Aliwijaya<sup>1,2\*</sup>, Safirotu Khoir<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Manajemen Informasi dan Perpustakaan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Teknik Utara, Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta

<sup>2</sup>Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu  
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu

### Article Info

#### Corresponding Author:

Araf Aliwijaya

✉ [arafaliwijayapasaribu@mail.ugm.ac.id](mailto:arafaliwijayapasaribu@mail.ugm.ac.id)

#### History:

Submitted: 20-06-2024

Revised: 25-04-2025

Accepted: 07-05-2025

#### Keyword:

Access restrictions; repository; academic libraries; open access; open access policy

#### Kata Kunci

Pembatasan akses; repositori; perpustakaan perguruan tinggi; open access; kebijakan akses

### Abstract

**Introduction.** Several academic libraries have implemented restrictions on repository access in recent years. This study explores the phenomenon of restricted access in academic libraries in managing their repositories.

**Research Methods.** This research uses a qualitative approach through interviews with six librarians from three academic libraries in the Special Region of Yogyakarta that have implemented repository access restrictions. Locations were selected through online observations of repository websites and direct. Library heads and staff involved in or understanding the access restriction process were selected purposively as informants.

**Data Analysis.** The interview data were analyzed using reduction and thematic categorization techniques. The data were presented and analyzed to draw conclusions.

**Results.** Librarians, who generally support open access, face requests from faculty and university leadership to restrict access. Restrictions are implemented to protect intellectual rights and sensitive data, to maintain physical visits to the library. Other factors include concerns about plagiarism, personal data protection, patent rights, and preventing the illegal document distribution.

**Conclusion.** There are eight factors in restricting access to academic library repositories. Access restrictions are based on the dynamic policies among stakeholders within the university. This study provides insights for academic library policymakers in balancing open access with intellectual property rights protection.

### Abstrak

**Pendahuluan.** Beberapa perpustakaan perguruan tinggi melakukan pembatasan akses repositori dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini mengeksplorasi fenomena pembatasan akses perpustakaan perguruan tinggi terkait repositori institusi.

**Metode Penelitian.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara enam pustakawan dari tiga perpustakaan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melakukan pembatasan akses repositori. Penentuan lokasi melalui observasi website repositori secara *online* dan langsung. Kepala dan staf perpustakaan yang terlibat atau memahami proses pembatasan akses repositori secara *purposive* dipilih sebagai informan.

**Analisis data.** Data wawancara dianalisis dengan teknik reduksi dan kategorisasi tematik. Selanjutnya data disajikan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

**Hasil.** Terdapat dinamika pustakawan yang umumnya mendukung *open access* harus berhadapan dengan permintaan dari dosen dan pimpinan universitas untuk membatasi akses repositori. Pembatasan akses dilakukan untuk melindungi hak intelektual dan data sensitif, menjaga kunjungan fisik ke perpustakaan. Selain itu, faktor lain yaitu kekhawatiran terhadap plagiarisme, perlindungan data pribadi dan hak paten, serta pencegahan distribusi dokumen secara ilegal.

**Kesimpulan.** Terdapat delapan faktor penyebab pembatasan akses repositori perpustakaan perguruan tinggi. Pembatasan akses repositori didasarkan pada dinamika antar pemangku kepentingan di perguruan tinggi. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan perpustakaan perguruan tinggi dalam menyeimbangkan keterbukaan akses dan perlindungan hak kekayaan intelektual.



Copyright © 2025 by  
Berkala Ilmu Perpustakaan  
dan Informasi

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the UGM Library and Archives.

 <https://doi.org/10.22146/bip.v21i1.14134>

## A. PENDAHULUAN

*Open access* mengacu pada pendekatan hasil penelitian ilmiah tersedia secara bebas dan dapat digunakan kembali (Lee et al., 2015). Perpustakaan perguruan tinggi semakin mendukung paradigma *open access* dan mulai menantang sistem komunikasi ilmiah tradisional (Dubinsky, 2019; Silva et al., 2021). Namun, realitas di lapangan akhir-akhir ini, khususnya di beberapa universitas di Indonesia, menunjukkan adanya kecenderungan untuk kembali melakukan pembatasan akses repositori, terutama pada koleksi skripsi, tesis, dan disertasi. Kebijakan pembatasan akses di perpustakaan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah dicanangkan tentang akses pengetahuan yang bebas dan terbuka (Wilson et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menyelidiki bagaimana dan mengapa fenomena pembatasan akses repositori ini terjadi.

Dalam sejarahnya, repositori pertama muncul pada tahun 1991 yang mengarsipkan publikasi di bidang fisika yaitu arXiv (Giesecke, 2011). Diikuti dengan munculnya repositori seperti EconPapers, CogPrints, dan PubMed Central. Repositori mendorong akumulasi, pelestarian, dan penyebaran produk intelektual dari dosen, staf peneliti, dan mahasiswa (Rafiq, 2022), yang kita kenal dengan *open access*. Gerakan *open access* dipelopori melalui deklarasi seperti *Budapest Open Access Initiative* tahun 2002, *Bethesda* dan *Berlin Declaration* pada awal tahun 2003 (BOAI, 2012; Madukoma & Adekunle, 2024). Gerakan *open access* tersebut menjangar ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Gerakan *open access* di Indonesia mulai mendapatkan momentum sekitar tahun 2010, dengan peralihan format penyimpanan hasil penelitian dari cetak menjadi digital seperti CD dan unggahan mandiri melalui sistem perpustakaan (Liau & Genoni, 2017; Priyanto, 2015; 2022). Terjadi peningkatan pertumbuhan repositori di Indonesia. Terdapat 183 repositori terdaftar di OpenDOAR dan 285 repositori di portal nasional Rama Repositori. Namun, observasi awal peneliti di perpustakaan perguruan

tinggi Yogyakarta justru menunjukkan bahwa hanya 1 dari 53 repositori yang masih berkomitmen pada kebijakan *open access*, khususnya untuk koleksi skripsi, tesis dan disertasi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai konsistensi dan keberlanjutan mengenai pengetahuan yang bebas dan terbuka di lingkungan akademik Indonesia.

Berbagai penelitian telah melakukan eksplorasi terhadap pengembangan repositori *open access*. Misalnya, Safira (2021) menyoroti dorongan *open access* sebagai cara untuk mencapai pelayanan prima di perpustakaan sehingga diperlukan kebijakan formal keterbukaan akses. Di sisi lain, penelitian Prost & Schöpfel (2014) di berbagai wilayah, termasuk Eropa, Asia, Afrika, Australasia, Amerika Utara, serta Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Karibia menemukan bahwa 78% tesis dan disertasi di berbagai benua tersebut adalah *open access*. Dalam konteks Indonesia, Rodliyah (2023) yang menunjukkan hanya 63% dari repositori di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang menganut kebijakan *open access*. Hal tersebut kontras yang disampaikan Irawan et al. (2021) bahwa Indonesia memiliki kecenderungan menurun dalam mengikuti kebijakan *open access* yang populer di belahan bumi utara.

Penelitian terkait *open access* di perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya fokus pada pentingnya pengembangan dan strategi repositori *open access* (Hartono, 2022; Kardi, 2019). Beberapa studi juga telah mengkaji tren dan perkembangan repositori *open access* di Indonesia (Asmad et al., 2018), serta menganalisis latar belakang, nilai-nilai yang memengaruhi, dan dampak dari perbedaan kebijakan *open access* (Pratama, 2018). Namun, kebanyakan dari kajian tersebut berfokus pada prinsip-prinsip *open access* tanpa membahas secara mendalam fenomena pembatasan akses repositori. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan investigasi terhadap pembatasan akses repositori yang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 126 perguruan tinggi di berbagai kabupaten (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023). Berdasarkan observasi konten awal melalui penelusuran di *search engine* Google, perpustakaan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki repositori institusi hanya sebanyak 55 perpustakaan. Observasi awal juga menemukan bahwa terdapat beberapa perpustakaan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan pembatasan akses repositori dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi alasan utama pembatasan akses repositori perpustakaan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari eksplorasi ini dapat menjadi dasar bagi perpustakaan dan institusi dalam menentukan atau mengubah kebijakan akses repositori. Studi ini diharapkan memperkaya literatur dengan mengungkap realitas pembatasan akses repositori yang terjadi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan solusi untuk menyikapi problematika dan dinamika kebijakan pembatasan akses repositori perpustakaan perguruan tinggi. Pertanyaan penelitian yang dijawab meliputi:

RQ1. Bagaimana proses pembatasan akses repositori perpustakaan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

RQ2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembatasan akses repositori perpustakaan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Jenis Akses Repositori**

Pertumbuhan repositori *open access* di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2008-2017 (Asmad et al., 2018). Dalam konteks yang sama, Harliansyah (2016) mencatat bahwa sekitar 2.600 repositori dari berbagai negara terdaftar di *Directory of Open Access Repositories* (DOAR) pada tahun 2016, menunjukkan bahwa sejak awal banyak repositori yang menerapkan

kebijakan akses terbuka. Namun, meski banyak yang masih mempertahankan kebijakan *open access*, beberapa repositori mengalami pembatasan akses. Beberapa repositori yang terdaftar di OpenDOAR dan *Registry of Open Access Repositories* (ROAR) tidak lagi dapat diakses (Liauw & Genoni, 2017). Studi oleh Prost & Schöpfel (2014) juga mengungkapkan bahwa dari 25 repositori dengan 2 juta koleksi, terdapat 48% koleksi yang aksesnya dibatasi.

Perkembangan jenis akses repositori telah mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Shukla & Khan (2014) menjelaskan jenis kebijakan akses repositori telah berkembang menjadi beberapa kategori utama, yaitu: akses terbuka untuk semua orang, akses terbuka hanya untuk anggota lembaga, akses terbatas, serta opsi akses yang berbeda untuk berbagai jenis material. Mishra & Kumar (2023) juga menyoroti tiga tipe utama kebijakan akses repositori, yaitu: 1) Hijau untuk semua pengguna; 2) Terbatas untuk pengguna luar; dan 3) Beberapa dokumen hanya tersedia untuk pengguna luar. Dalam konteks Indonesia, Aliwijaya & Khoir (2023) menemukan bahwa jenis akses repositori juga sangat beragam, termasuk: 1) *open access*; 2) akses terbuka hanya untuk pengguna internal; 3) akses terbuka hanya untuk bab tertentu dari dokumen; dan 4) akses terbuka hanya untuk versi rangkuman dari dokumen. Berdasarkan literatur di atas, terdapat beberapa model pembatasan akses repositori, yaitu: 1) terbatas untuk pengguna luar; 2) akses pengguna terbatas baik untuk pengguna luar maupun internal; 3) opsi akses yang berbeda untuk berbagai jenis material; dan 4) akses terbuka hanya untuk bab tertentu dari dokumen.

### **Pembatasan Akses Repositori**

Penelitian melaporkan banyak repositori mengalami pembatasan akses dengan alasan yang beragam. Misalnya, Liauw dan Genoni (2017) mencatat bahwa beberapa repositori yang terdaftar di OpenDOAR dan ROAR tidak lagi dapat diakses. Namun, penelitian repositori di Indonesia justru banyak berfokus pada kaca mata *open access* (Cahyono, 2019; Safira, 2021). Padahal,

kebijakan pembatasan akses terhadap repositori di Indonesia masih lazim diterapkan, terutama untuk pengunjung dari luar institusi (Nurdin & Mukhlis, 2019). Priyanto (2022) mencatat “*while some libraries already applied OA for their research reports, thesis, and dissertations, many still restrict or close the online access to these resources*”.

Pihak yang terlibat dalam pembatasan akses repositori perpustakaan perguruan tinggi yaitu pustakawan, pihan universitas dan penasihat hukum. Pustakawan dan penganggung jawab repositori memiliki peran penting dalam menyusun pengajuan dan pembuatan kebijakan akses repositori institusi (Anderson & Leachman, 2020; Kyprianos & Lygnou, 2022; Rinehart & Cunningham, 2017). Pustakawan berperan dalam pengumpulan terkait masalah hak cipta yang dilaporkan oleh pengguna dalam proses pengelolaan repositori (Vollmer, 2022). Pihak universitas seperti wakil rektor bidang penelitian bertanggung jawab mengawasi kebijakan repositori dan distribusi konten yang sah (Marsh, 2015). Di sisi lain, penasihat hukum dari perguruan tinggi sering dilibatkan untuk memastikan kebijakan repositori sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku (Rinehart & Cunningham, 2017; Silveira & Vanz, 2023). Pihak-pihak tersebut saling berdinamika untuk menentukan kebijakan akses repositori baik *open access* maupun akses terbatas.

Berbagai faktor pembatasan akses repositori telah dilaporkan dalam penelitian sebelumnya. Alasan utama untuk pembatasan akses ini termasuk kekhawatiran terhadap pelanggaran akademik, terutama plagiarisme, yang dapat merusak integritas akademik sebuah institusi. Priyanto (2022) menyatakan “*for one thing, they close their access because libraries are of the opinion that OA may cause academic misconduct, especially plagiarism*”. Selain itu, pembatasan akses ini sering kali berimbas negatif pada pengguna perpustakaan, terutama generasi digital yang merasa terhambat dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan. Di sisi lain, yang melandasi pembatasan akses ke repositori institusi adalah untuk

mengantisipasi terjadinya plagiarisme dan sebagai langkah perlindungan karya akademik (Ernaningsih, 2018). Di sisi lain, Stren (2014) menemukan bahwa kerahasiaan data menjadi alasan pembatasan akses repositori di Rusia terutama untuk karya mahasiswa dengan data penelitian sensitif. Berbeda dengan Nigeria, Ukwoma & Ngulube (2019) menemukan infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya keterampilan teknis di kalangan akademisi menghambat penggunaan efektif dan akses terbuka repositori institusi.

Laporan penelitian menunjukkan perpustakaan dari berbagai negara juga telah melakukan pembatasan akses repositori akibat faktor teknis dan non teknis. Di Amerika Serikat dan Austria, keterbatasan teknis dan sumber daya menjadi hambatan operasional sistem repositori (Anderson & Leachman, 2020; Blumesberger, 2018). Laporan lain menunjukkan bahwa negara-negara di Eropa Timur dan Asia Timur menjadikan hak cipta, lisensi, dan keamanan data menjadi alasan pembatasan akses (Makhotina & Pshenichnaya, 2021). Tidak hanya itu, kendala ekonomi yang ditandai oleh pemotongan anggaran dan tingginya biaya langganan mendorong perpustakaan membatasi atau menutup akses repositori di Zimbabwe (Tapfuma & Hoskins, 2019) dan Kanada (Dawson & Yang, 2016). Dengan demikian, penutupan akses dilakukan bukan karena perencanaan kebijakan melainkan karena kurangnya dukungan teknologi dan kendala ekonomi.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi digunakan untuk mengeksplorasi fenomena pembatasan akses repositori. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencakup tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan kualitatif digunakan mengeksplorasi mendalam terkait informasi, pengalaman dan persepsi informan secara mendalam melalui interaksi langsung.

Tempat penelitian ditentukan melalui tiga tahap: 1) Pencarian konten website repositori; 2) indentifikasi kebijakan akses; 3) Pencarian dan observasi perpustakaan yang melakukan pembatasan akses repositori. Observasi secara online dilakukan untuk menemukan perpustakaan perguruan tinggi dengan kebijakan akses repositori tertutup (*close access*). Selanjutnya, observasi secara langsung dilakukan untuk menemukan perpustakaan perguruan tinggi yang telah melakukan proses pembatasan akses repositori. Peneliti menemukan tiga perpustakaan perguruan tinggi yang melakukan pembatasan akses repositori. Kriteria perpustakaan perguruan tinggi yang dipilih yaitu: 1) Pernah memiliki kebijakan repositori *open access*, dan 2) Melakukan pembatasan akses repositori.

Sebanyak enam pustakawan dari tiga perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta berpartisipasi dalam penelitian ini (Tabel 1). Pendekatan pengambilan sampel dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan menetapkan subjek berdasarkan kriteria spesifik dan *purpose* (tujuan) yang ditetapkan (Creswell & Creswell, 2017). Informan yang dipilih yaitu kepala perpustakaan dan staf pengelola repositori untuk mencapai triangulasi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan menyesuaikan data wawancara kepala perpustakaan dan staf pengelola repositori dibandingkan dengan hasil observasi. Peneliti juga melakukan konfirmasi bahwa informan terlibat atau memahami proses pembatasan akses repositori.

Wawancara mengangkat beberapa isu seperti alasan melakukan pembatasan akses, inisiator dan kejadian dibalik pembatasan akses. Seluruh wawancara dilakukan menggunakan panduan semi-terstruktur untuk menjaga konsistensi dan akurasi data. Wawancara direkam dan dilakukan di ruangan masing-masing pustakawan. Wawancara diawali dengan mempraktikkan dan mendiskusikan cara akses repositori tersebut terlebih dahulu untuk menkonfirmasi kesesuaian kriteria. Selanjutnya, wawancara berkaitan dengan

topik penelitian dengan durasi sekitar 30-55 menit.

Transkripsi wawancara dianalisis menggunakan analisis konten dan diklasifikasikan ke dalam tema tertentu (Neuendorf, 2018). Tema-tema tersebut berasal dari analisis isu yang dibahas informan terkait pembatasan akses repositori perpustakaan. Pengkodean dilakukan secara manual dengan menandai kata kunci pada transkrip wawancara. Setiap transkrip dengan kata kunci yang sama dikelompokkan dalam aplikasi *google spreadsheet*. Kata kunci tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori tersebut dikembangkan tema utama yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Nama ketiga perpustakaan perguruan tinggi disebutkan dengan inisial Perpustakaan A, B, dan C. Semua kutipan dari informan yang dilaporkan secara verbatim kecuali hal-hal privasi tertentu sebagai komitmen etika penelitian.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Website Repositori Perpustakaan Perguruan Tinggi**

Temuan dari pencarian konten website repositori perpustakaan perguruan tinggi mengungkapkan adanya variasi kebijakan akses repositori. Terdapat 126 perguruan tinggi yang tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023). Dari perguruan tinggi tersebut, hanya 55 perpustakaan yang memiliki website repositori institusi yang dapat diakses. Namun, 71 website repositori perpustakaan lainnya belum dapat diidentifikasi.

Dari 55 perpustakaan yang memiliki repositori, hanya 6 di antaranya yang memungkinkan akses penuh (*open access*) ke seluruh konten yang tersedia. Selain itu, sebanyak 49 perpustakaan menerapkan berbagai jenis pembatasan akses pada repositori mereka. Jenis pembatasan (Gambar 1) yang diidentifikasi meliputi: 1) Hanya dapat melihat judul dan abstrak; 2) Hanya dapat mengakses judul, abstrak, bab 1 dan bab terakhir, serta; 3) Hanya dapat mengakses judul, abstrak, dan rangkuman dari skripsi, tesis, dan disertasi. Selama

proses observasi konten, belum dapat dipastikan apakah perpustakaan tersebut mengimplementasikan kebijakan akses melalui portal akademik khusus untuk pengguna internal atau membatasi akses hanya melalui komputer yang berada di perpustakaan.

### **Cara Akses Konten Repositori**

Masing-masing kepala perpustakaan mendeskripsikan wawasan tentang perkembangan terkini dalam kebijakan akses repositori. Kepala Perpustakaan A, B, dan C menggambarkan variasi kebijakan dan pengaturan cara akses konten repositori.

*“Kita aksesnya internal. kita bisa diakses semua melalui aplikasi MyPustaka untuk semua bab apapun itu tanpa terkecuali menggunakan SSO. Hanya terbuka untuk sivitas akademik. Untuk akses eksternal harus menggunakan surat resmi dan nanti akan dipertimbangkan.”* Sa, Kepala Perpustakaan A.

*“Kebijakan akses yang terbaru ini mahasiswa hanya bisa mengakses melalui komputer-komputer yang disediakan di perpustakaan. Baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan fakultas. Mekanisme eksternal, kalau memang mereka ada surat izin dari institusinya kami masih bisa layani.”* Ti, Kepala Perpustakaan B

*“Sejak awal 2023, Pada umumnya yang dibuka hanya judul dan abstrak. Mengakses keseluruhan menggunakan komputer perpustakaan yang terhubung jaringan internet perpustakaan tanpa akun.”* Li, Kepala Perpustakaan C

Ketiga perpustakaan tersebut menerapkan kebijakan pembatasan akses terhadap konten repositori dengan pembatasan yang berbeda-beda. Kepala Perpustakaan A mengungkapkan bahwa akses ke konten repositori dapat dijangkau menggunakan *Single Sign-On* (SSO) dan terbatas hanya untuk anggota sivitas akademik (akses anggota lembaga). Perpustakaan B dan C telah memperketat akses dengan membatasi penggunaan konten repositori hanya melalui komputer yang tersedia di lokasi perpustakaan (akses

pengguna terbatas). Di sisi lain, akses untuk pengguna eksternal dapat mendatangi perpustakaan atau melakukan permintaan melalui email dengan menggunakan surat resmi. Cara akses pengguna internal dan eksternal terhadap konten repositori tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

### **Perubahan Kebijakan Akses Repositori**

Kebijakan akses terhadap repositori perpustakaan perguruan tinggi telah mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Kepala Perpustakaan A, B, dan C mendeskripsikan transisi kebijakan repositori *open access* menjadi akses terbatas. Dinamika perubahan kebijakan akses tersebut, dari kebebasan akses penuh hingga pembatasan selektif yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keamanan materi akademik.

*“Untuk yang develop sendiri 2012-2016 itu aksesnya bab 1,2,5 open dan 3 4 close access. Untuk yang DSpace 2016-2020 semua open access. 2020, aplikasi Eprint terintegrasi dengan MyPustaka sampai sekarang itu internal akses.”* Sa, Kepala Perpustakaan A.

*“Kebijakan akses ETD itu berubah-ubah, pertama dibatasi, kedua open access, yang ketiga dibatasi lagi, yang keempat itu dibuka bab satu dan bab lima, terus yang terakhir itu dibatasi lagi. Kita pernah membuka akses seluruhnya, kemudian ditutup lagi”* Ti, Kepala Perpustakaan B

*“Dari 2011 sampai 2023 open access. Rapat mengenai penutupan akses itu awal tahun 2023. Dan langsung kita laksanakan kebijakan akses yang dibatasi tadi itu sejak awal 2023.”* Li, Kepala Perpustakaan C

Ketiga perpustakaan telah mengalami fase penerapan kebijakan *open access* repositori. Namun, masing-masing perpustakaan tersebut menyesuaikan kebijakan akses mereka dengan konsep yang berbeda (lihat tabel 2). Kepala Perpustakaan A menjelaskan bahwa dari tahun 2012 hingga 2016, hanya beberapa bab yang diberikan akses terbuka, sedangkan bab lainnya tetap terbatas. Perpustakaan B dan C juga

mengalami beberapa perubahan dalam kebijakan akses repositori. Perpustakaan B telah mengalami empat fase perubahan mulai dari pembatasan ketat hingga akses terbuka, dan kembali ke pembatasan akses. Sementara itu, repositori Perpustakaan C hampir satu dekade akses terbuka, namun membatasi akses pada awal tahun 2023.

### Rapat Pembatasan Akses Repositori

Kepala Perpustakaan A, B, dan C mendeskripsikan proses perubahan kebijakan dan perbedaan pendapat antara pustakawan, dosen, dan pimpinan universitas tentang bagaimana seharusnya kebijakan akses diatur.

*“Saat rapat akademik, saya berhadapan dengan dosen-dosen yang mayoritas menginginkannya close access. Kita inginnya open access”.* Sa, Kepala Perpustakaan A.

*“Ada rapat rutin, di bawah wakil rektor. Kami mengajukan rancangan untuk membuka secara keseluruhan full text untuk publik. Hal tersebut inisiatif dari pustakawan. Di situ mentah dan tidak disetujui. Malah pada waktu itu akhirnya diminta ditutup semua”.* Ti, Kepala Perpustakaan B

*“Kami rapat dengan wakil rektor urusan akademik, ketua program studi dan dekan, Wakil rektor urusan akademik dan dosen-dosen minta, bagaimana kalau akses untuk orang luar kampus ditutup. Lalu kami putuskan untuk civitas akademik bisa mengakses melalui perpustakaan.”* Li, Kepala Perpustakaan C

Data wawancara yang diungkapkan menggambarkan berbagai perbedaan dalam proses pengambilan kebijakan akses. Perbedaan pendapat antara pustakawan, dosen, dan pimpinan universitas menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki pandangan dan kepentingan. Hal tersebut berkaitan mengenai bagaimana dan kepada siapa akses terhadap informasi harus diberikan. Dinamika dalam rapat berbagai pihak dalam pembahasan ini menghasilkan solusi,

meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan yang ideal bagi semua pihak.

### Alasan Pembatasan Akses Repositori

Wawancara dilakukan terhadap informan menunjukkan berbagai alasan pembatasan akses repositori yang dikemukakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Termasuk kekhawatiran seputar konversi karya ilmiah menjadi publikasi jurnal yang terpengaruh oleh status *open access*.

*“... ketika mereka submit artikelnya dengan mahasiswa ke jurnal, jurnalnya tolak karena mirip dengan yang ada direpositori”* Perpustakaan A

*“... mahasiswa membuat karya ilmiah tugas akhir kemudian di upload di repositori, mungkin tugas akhirnya itu akan dikembangkan menjadi artikel jurnal yang dipublikasi. Untuk menghindari similaritas yang tinggi, perlu tidak dipublikasi secara full”* Li, Kepala Perpustakaan C

Pembatasan akses juga dilakukan dengan alasan perlindungan data penelitian dan menghindari konflik legal. Isu-isu seperti penyebaran informasi sensitif, penggunaan data yang tidak tepat, dan potensi pencemaran nama baik menjadi pertimbangan krusial.

*“Dulu ada penelitian dipublikasikan di repositori, menyimpulkan bahwa supermarket A tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemakmuran masyarakat sekitar. Pemilik supermarketnya itu protes karena ia merasa itu penyebaran nama baik.”* Ti, Kepala Perpustakaan B

*“... ada yang komplain karena gambar tanda tangan yang ada di dalam karya itu terindeks oleh google. Karena skripsi yang kita upload itu kan full, termasuk tanda tangan perusahaan tempat penelitian, pembimbing, penguji, pemilik karya.”* Li, Kepala Perpustakaan C

*“Mahasiswa itu tidak menyadari bahwa riset itu adalah riset baru.... Idenya dicuri, kan idenya dicuri oleh orang lain. Dia belum mematenkan, lalu dipaten oleh orang lain.”* Ti, Kepala Perpustakaan B

Kekhawatiran terhadap kualitas karya yang rendah sering mendorong para akademisi untuk meminta penutupan akses terhadap tesis atau disertasi mereka. Selain itu, masalah plagiasi yang berpotensi meningkat dengan *open access* juga menjadi pertimbangan serius dalam pembahasan kebijakan akses di banyak institusi pendidikan.

*“... ada telepon dan kita tidak tau alasannya, “pokoknya saya minta, tesisnya saya ditutup”. Sampai judul-judulnya juga tidak boleh dipublikasikan. Saya curigai tulisan itu kualitasnya tidak bagus.”* Ti, Kepala Perpustakaan B

*“... termasuk juga soal plagiasi. Kami belum ketemu antisipasinya ketika banyak plagiasi kalau kita buka repositori. Kalau saya tanya selama ini sebetulnya banyak juga tidak tahu antisipasinya.”* Ti, Kepala Perpustakaan B

Insiden unduhan massal yang terjadi menyoroti risiko eksploitasi konten repositori oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Potensi komersialisasi ilegal dari karya akademik juga mendukung perlunya batasan akses untuk mencegah praktik seperti penjualan konten di website lain tanpa izin.

*“Sebelumnya itu universitas sudah pernah membuka seluruhnya. Kejadian itu didownload secara besar-besaran. Kita perkirakan oleh para pembuat skripsi, itu kemudian ditutup lagi.”* Ti, Kepala Perpustakaan B

Kepentingan untuk menjaga kunjungan ke perpustakaan secara fisik juga menjadi faktor pembatasan akses repositori. Dikhawatirkan *open access* dapat mengurangi frekuensi kunjungan fisik yang berpotensi memengaruhi evaluasi akreditasi.

*“... kita juga ingin mempertahankan traffic kunjungan website. Yang menggembirakan traffiknya tinggi. mahasiswa keseluruhan yang aktif itu sekitar 24.000 dan traffic*

*terakhir awal tahun, saat kami audit itu 18.000, sudah mencapai target.”* Kepala Perpustakaan A

*“... agar kunjungan perpustakaan stabil. Karena ketika semuanya sudah bisa diakses full itu juga nanti akan sedikit mengurangi tingkat kunjungan.”* Nam, Staf Perpustakaan C

Hasil menunjukkan bahwa berbagai pemangku menunjukkan kekhawatiran berbagai hal yang berkaitan dengan dampak dari *open access*. Dilema antara aksesibilitas dan perlindungan data menjadi alasan utama dibalik dinamika kebijakan akses repositori. Prioritas antara pemanfaatan teknologi untuk penyebaran pengetahuan atau menjaga data, informan dan objek penelitian menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan.

### **Proses dan Aktor Pembatasan Akses Repositori**

Perpustakaan A, B, dan C memiliki proses berbeda dalam pembatasan akses repositori. Di Perpustakaan A, perumusan masalah dimulai dengan identifikasi keluhan terkait akses repositori dari dosen, mahasiswa, dan pustakawan, yang kemudian dibahas dalam rapat akademik. Di Perpustakaan B, masalah terkait kebijakan *open access* dibahas dalam rapat pimpinan universitas, yang berujung pada kebijakan penutupan akses repositori, disetujui oleh pimpinan universitas dan wakil dekan. Sementara itu, di Perpustakaan C, pembahasan dampak *open access* melibatkan berbagai pemangku kepentingan, namun karena keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi, kebijakan akses terbatas hanya melalui komputer perpustakaan ditetapkan oleh Wakil Rektor dengan implementasi teknis diserahkan kepada perpustakaan dan divisi IT.

Terdapat dinamika yang menarik seputar aktor pembatasan kebijakan akses pada repositori akademik (lihat Tabel 3). Mayoritas pustakawan mengungkapkan keinginan untuk menerapkan kebijakan *open access*. Namun, keinginan pustakawan ini tampaknya berseberangan dengan pandangan mayoritas dosen, kepala program studi, dan

wakil dekan bidang akademik yang lebih cenderung menginginkan pembatasan akses. Di sisi lain, wakil rektor di beberapa institusi tampaknya memiliki pandangan yang berbeda terkait kebijakan akses, menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan kebijakan di tingkat lebih tinggi.

Awalnya Perpustakaan A mendukung *open access*, akhirnya disepakati perubahan menjadi akses yang eksklusif hanya untuk anggota lembaga. Akses repositori tersebut dapat dilakukan melalui sistem SSO (*Single Sign-On*) internal. Hal tersebut sebagai kompromi untuk membatasi akses eksternal namun tetap memudahkan akses bagi anggota lembaga. Sedangkan di Perpustakaan B dan C, kebijakan yang diambil adalah memberikan akses pengguna terbatas yaitu koleksi dapat diakses hanya melalui komputer yang ada di perpustakaan. Identifikasi di atas sejalan dengan yang disampaikan Rafiq (2022), menyatakan bahwa konsep repositori di kalangan pemangku kepentingan menjadi salah satu isu yang memengaruhi perkembangan repositori. Namun, temuan “*kepala perpustakaan tidak memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan*” yang disampaikan Handoyo & Istiarni (2020) tidak sepenuhnya terdapat di perpustakaan perguruan tinggi. Justru, Perpustakaan A memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan akses repositori melalui diskusi untuk mengambil “jalan tengah” yang sesuai.

Pustakawan, penganggung jawab repositori dan pihak universitas seperti wakil rektor bidang penelitian memiliki peran penting dalam menyusun pengajuan pembatasan akses repositori institusi (Anderson & Leachman, 2020; Kyprianos & Lygnou, 2022; Marsh, 2015; Rinehart & Cunningham, 2017). Namun, dalam penelitian ini ditemukan yang memiliki peran utama dalam mengajukan pembatasan akses repositori adalah dosen dari program studi dan didukung wakil dekan akademik. Meskipun pustakawan dan wakil rektor akademik memiliki pandangan yang sama terkait kebutuhan *open access*, namun dalam proses rapat tetap menentukan pembatasan akses repositori atas dorongan dosen, kaprodi

dan wakil dekan akademik. Hal ini menunjukkan, pembatasan akses tidak selalu atas rekomendasi dari pimpinan tertinggi perguruan tinggi, melainkan atas dasar dorongan dari dosen perguruan tinggi tersebut. Hal ini mendukung bahwa penutupan akses sering kali disebabkan oleh adanya resistensi dari pihak dosen (Fitriani, 2017).

Dalam temuan penelitian sebelumnya penasihat hukum dari perguruan tinggi sering dilibatkan untuk memastikan kebijakan repositori sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku (Rinehart & Cunningham, 2017; Silveira & Vanz, 2023). Namun, dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya keterlibatan penasihat hukum dalam menentukan kebijakan akses repositori perpustakaan perguruan tinggi. Terdapat dugaan bahwa pemaknaan terhadap etika publikasi dan hak cipta ditafsirkan oleh masing-masing pimpinan, pustakawan dan dosen. Hal ini bisa berakibat perbedaan persepsi terhadap tujuan dari *open access* yang tarik menarik dengan pelanggaran publikasi akademik. Dugaan ini memiliki keterkaitan dengan temuan Fitriani (2017) bahwa, kurangnya komunikasi yang efektif dari pustakawan mengenai manfaat dan pentingnya kebijakan *open access*. Oleh karena itu, perlu melibatkan penasihat hukum untuk kehati-hatian dalam menentukan pembatasan akses repositori perpustakaan perguruan tinggi.

Pustakawan pada awalnya mempromosikan *open access* dengan meningkatkan kesadaran sivitas akademik terkait tentang hak kepenulisan (Chaudhuri & Baker, 2015; Dubinsky, 2019). Namun, pada perjalanannya, terdapat dorongan pembatasan akses dari berbagai pihak di perguruan tinggi termasuk dari pimpinan universitas. Pembahasan kebijakan menghasilkan variasi pembatasan akses dipengaruhi oleh dinamika pemangku kepentingan. Pembatasan akses repositori menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan internal dan respon terhadap permasalahan yang dihadapi.

### Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembatasan Akses Repositori

Pembatasan akses repositori dilandasi oleh berbagai faktor salah satunya adalah kekhawatiran bahwa *open access* meningkatkan risiko plagiarisme. Temuan ini membenarkan bahwa beberapa akademisi meminta penutupan akses terhadap tesis atau disertasi mereka karena takut karya mereka digunakan tanpa izin atau dimanipulasi (Fitriani, 2017). Kekhawatiran ini beralasan, mengingat insiden plagiarisme yang berpotensi meningkat dengan akses yang lebih terbuka. Namun, hal ini juga menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih baik untuk melindungi karya dan memastikan kualitas karya akademik tanpa harus membatasi akses informasi.

Selain kekhawatiran terhadap plagiarisme, ada faktor lain yang memengaruhi kebijakan pembatasan akses repositori yaitu penyalahgunaan data penelitian. Temuan menunjukkan pembatasan akses repositori menghindari penyalahgunaan data penelitian dan melindungi informasi sensitif. Kebijakan pembatasan akses repositori bertujuan melindungi dari penyebaran informasi sensitif dan potensi pencemaran nama baik (Ernaningsih, 2018). Stren (2014) juga menemukan hal yang sama, bahwa kerahasiaan data menjadi alasan pembatasan akses repositori di Rusia terutama untuk karya mahasiswa dengan data penelitian sensitif. Namun, perlu untuk melihat isu ini dari sudut pandang kode etik penelitian untuk memastikan informan dilindungi secara etis dan bertanggung jawab tanpa harus membatasi akses repositori.

Karya mahasiswa dapat dikembangkan menjadi beberapa artikel jurnal. Namun, hal tersebut sering menemui masalah seperti similaritas konten. Sejalan dengan yang disampaikan Koler-Povh et al. (2014), konversi ini bisa meningkatkan permasalahan dalam pengelolaan repositori, termasuk risiko penolakan oleh jurnal jika karya dianggap terlalu mirip dengan materi yang sudah ada di repositori. Permasalahan konversi karya memicu kebijakan pembatasan akses untuk melindungi

integritas akademik dan menghindari indikasi plagiarisi. Loan & Shah (2020) juga menekankan pentingnya pedoman dan kebijakan yang jelas yang mengatur proses konversi terutama terkait dengan manajemen hak akses dan kebijakan penggunaan kembali. Meski terdapat pilihan untuk menentukan kebijakan embargo, dalam konteks penelitian ini perpustakaan perguruan tinggi lebih memilih membatasi akses repositori sebagai solusi permasalahan konversi karya.

Menariknya, pada penelitian ini menemukan bahwa pembatasan akses ke repositori didorong oleh kekhawatiran terkait insiden unduh massal dan distribusi ilegal konten akademik. Data dari penelitian lapangan menunjukkan terdapat insiden unduhan massal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Unduh massal konten repositori tersebut memiliki indikasi untuk tujuan komersial pihak-pihak tertentu. Pustakawan mengetahui kejadian tersebut dengan memperhatikan statistik unduhan saat penerapan kebijakan *open access*. Kekhawatiran insiden unduh massal karya repositori mendorong institusi untuk melakukan pembatasan akses secara cepat meskipun belum ada investigasi lebih lanjut.

Terdapat kekhawatiran bahwa peningkatan akses repositori secara bebas dapat menurunkan frekuensi kunjungan fisik ke perpustakaan. Hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada evaluasi akreditasi. Di sisi lain, penting juga untuk menjaga *traffic* kunjungan secara *online*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses *online* tinggi, kunjungan fisik tetap menjadi indikator penting dalam penilaian akreditasi. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, pembatasan akses repositori dimaksudkan untuk mempertahankan stabilitas kunjungan fisik untuk kebutuhan penilaian akreditasi.

Dalam perspektif perpustakaan perguruan tinggi, pembatasan akses terhadap repositori dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari publikasi karya yang dianggap belum memadai. Selain itu, ada kekhawatiran tentang pencurian ide yang belum dipatenkan. Karya atau penelitian yang diunggah secara terbuka berisiko

diambil oleh pihak luar yang kemudian dapat mematenkan ide tersebut terlebih dahulu. Hal yang sama juga terjadi di Afrika Selatan, ancaman terhadap keamanan informasi telah menyebabkan penutupan repositori (Garaba, 2019; Makhotina & Pshenichnaya, 2021). Negara-negara di Eropa Timur dan Asia Timur juga menjadikan keamanan menjadi alasan pembatasan akses (Dawson & Yang, 2016; Makhotina & Pshenichnaya, 2021). Namun, kekhawatiran utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kerugian bagi peneliti asli dalam hal hak intelektual dan potensi manfaat ekonomi dari inovasi mereka.

Penelitian lain melaporkan bahwa kendala ekonomi yang ditandai oleh pemotongan anggaran dan tingginya biaya langganan mendorong perpustakaan membatasi atau menutup akses repositori (Dawson & Yang, 2016; Tapfuma & Hoskins, 2019). Hal yang sama juga terjadi yakni keterbatasan teknis dan sumber daya menjadi hambatan operasional sistem repositori (Anderson & Leachman, 2020; Blumesberger, 2018). Namun, pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya kekurangan sumber daya, ekonomi, dan keterbatasan teknis sebagai faktor penyebab pembatasan akses. Hal ini diduga karena kasus penelitian yang sangat spesifik hanya pada perpustakaan perguruan tinggi melakukan pembatasan akses dari sebelumnya *open access*. Oleh karena itu, perlu memperluas kajian pada kasus perpustakaan yang melakukan pembatasan akses akibat keterbatasan sumber daya.

Penelitian Rafiq (2022) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan repositori institusi, seperti keterampilan staf, hak cipta, dana, peralatan, kebijakan, prioritas proyek lain, komitmen manajemen, dan pemahaman konsep Institutional Repository (IR). Penelitian tersebut hanya membahas faktor yang memengaruhi kebijakan akses repositori termasuk kebijakan aksesnya. Namun, penelitian tersebut belum berfokus pada satu aspek yaitu pembatasan akses repositori yang sebelumnya *open access*. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena di lapangan, temuan

empiris faktor yang memengaruhi pembatasan akses repositori yaitu konversi karya, plagiasi, data pribadi dan identitas informan, hak paten, unduh massal, distribusi ilegal, kualitas karya, akreditasi (Gambar 3). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang ditemukan dalam pengelolaan repositori. Hal tersebut menuntut perhatian lebih lanjut pada kebijakan dan prosedur pengelolaan data repositori.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan kebijakan pembatasan akses repositori di perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Proses pembatasan akses dimulai dengan merumuskan masalah berdasarkan keluhan dosen, mahasiswa dan pustakawan terkait akses repositori. Permasalahan tersebut dibahas dalam rapat akademik yang memunculkan perdebatan antara prinsip *open access* dan *close access*. Dinamika pembatasan akses repositori ini dipengaruhi oleh pustakawan yang umumnya mendukung *open access* dan berbagai pemangku kepentingan akademik yang lebih cenderung memilih pembatasan akses. Namun, perlu melibatkan penasehat hukum dalam merumuskan etika publikasi dan hak cipta yang tidak ditunjukkan pada penelitian ini. Pembatasan akses repositori didorong oleh berbagai faktor seperti kekhawatiran terhadap plagiasi, perlindungan data pribadi dan identitas informan, hak paten, upaya menghindari insiden unduh massal dan distribusi ilegal konten akademik, dan mencegah pencurian ide yang belum dipatenkan. Kebijakan pembatasan akses juga dimaksudkan mempertahankan kunjungan fisik ke perpustakaan untuk penilaian akreditasi. Temuan ini menyoroti pembatasan akses repositori mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan yang lebih berfokus pada perlindungan karya intelektual dan data sensitif dari pada ketersebaran pengetahuan. Temuan ini juga menunjukkan solusi fleksibel bagi perpustakaan dalam menyikapi keterbukaan dan perlindungan informasi. Penelitian ini memberi masukan bagi kebijakan repositori perpustakaan

perguruan tinggi dalam menyeimbangkan *open access* dan perlindungan kekayaan intelektual. Penelitian berikutnya perlu mengkaji dan membandingkan alasan mengapa repositori *open access* atau *close access* masih dipertahankan, lalu melihat perbedaannya dengan repositori yang melakukan pembatasan akses.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aliwijaya, A., & Khoir, S. (2023). Better open or closed? Library institutional repository access policies in Yogyakarta Indonesia. Makalah dipresentasikan dalam *International Graduate Students and Scholars' Conference in Indonesia (IGSSCI)*.
- Anderson, T., & Leachman, C. (2020). Centering accessibility: A review of institutional repository policy and practice. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, 8(1), 1-17. <https://doi.org/10.7710/2162-3309.2383>
- Asmad, C. C., Mathar, T., Akbar, A. K., Arifin, N., H., H., I., I., & S. (2018). Tren perkembangan open access institutional repository pada perguruan tinggi di Indonesia. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 6(2), 168–180. <https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a8>
- Blumesberger, S. (2018). New requirements – many open questions. On the diverse roles of repositories using the example of the Vienna university library. *VOEB-Mitteilungen*, 71(1), 149–161. <https://doi.org/10.31263/voebm.v71i1.2003>
- BOAI. (2012). *Prologue: The Budapest open access initiative after 10 years*. Open Access Initiative Declaration; September 2012. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/>
- BPS Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Provinsi DI Yogyakarta dalam angka 2023*. <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2023/02/28/026aad493ec54b735d608483/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2023.html>
- Cahyono, H. A. (2019). Implementasi kebijakan akses fulltext karya ilmiah dosen pada repositori institusi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan. *Tibannbaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 3(1), 41–54. <https://doi.org/10.30742/tb.v3i1.681>
- Chaudhuri, J., & Baker, S. (2015). Identifying open access articles within the top ten closed access LIS journals: A global perspective. *Library Philosophy and Practice*, 2015(1), [1-15].
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dawson, P. H., & Yang, S. Q. (2016). Institutional repositories, open access and copyright: What are the practices and implications? *Science and Technology Libraries*, 35(4), 279–294. <https://doi.org/10.1080/0194262X.2016.1224994>
- Dubinsky, E. (2019). Does open access make cents?: Return on investment in the institutional repository. *College and Research Libraries News*, 80(5), 281–284. <https://doi.org/10.5860/crln.80.5.281>
- Ernaningsih, D. N. (2018). Institutional repository access policy: A case study in State University of Malang Library. *Record and Library Journal*, 3(1), 25–37. <https://doi.org/10.20473/rlj.v3-i1.2017.25-37>
- Fitriani, D. N. (2017). Studi kasus peran pustakawan dalam penerapan open access di Perpustakaan UIN Malang. *Acarya Pustaka*, 3(2), 29–41. <https://doi.org/10.23887/ap.v3i2.13057>
- Garaba, F. (2019). The demise of the Lutheran Theological Institute library and archives in retrospect: Reflections of a manuscript librarian in Pietermaritzburg, South Africa. *Missionalia*, 46(3), 355–366. <https://doi.org/10.7832/46-3-251>
- Giesecke, J. (2011). Institutional repositories: Keys to success. *Journal of Library Administration*, 51(5–6), 529–542.

- <https://doi.org/10.1080/01930826.2011.589340>
- Handoyo, E., & Istiarni, A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan open access di perpustakaan perguruan tinggi negeri: Studi kasus perpustakaan perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. *Visi Pustaka: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*, 22(1), 15–26.
- Harliansyah, F. (2016). Institutional repository sebagai sarana komunikasi ilmiah yang sustainable dan reliable. *Pustakaloka*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v8i1.497>
- Hartono, H. (2022). Representasi demokrasi informasi sebagai strategi pengembangan perpustakaan dalam ekosistem digital studi teoritis pendekatan dalam membangun open access pada perpustakaan perguruan tinggi di Malang. *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 13(1), 21–32. <https://doi.org/10.20885/unilib.vol13.iss1.art4>
- Irawan, D. E., Abraham, J., Zein, R. A., Ridlo, I. A., & Aribowo, E. K. (2021). Open access in Indonesia. *Development and Change*, 52(3), 651–660. <https://doi.org/10.1111/dech.12637>
- Kardi, K. (2019). Integrasi interkoneksi sains dan studi agama dalam implementasi open access repository di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.24952/ktb.v1i2.2053>
- Koler-Povh, T., Mikoš, M., & Turk, G. (2014). Institutional repository as an important part of scholarly communication. *Library Hi Tech*, 32(3), 423–434. <https://doi.org/10.1108/LHT-10-2013-0146>
- Kyprianos, K., & Lygnou, E. (2022). Institutional repositories and copyright in Greek academic libraries. *JLIS.It*, 13(2), 92–112. <https://doi.org/10.36253/jlis.it-449>
- Lee, J., Burnett, G., Vandegrift, M., Baeg, J. H., & Morris, R. (2015). Availability and accessibility in an open access institutional repository: A case study. *Information Research*, 20(1), paper 661. <http://InformationR.net/ir/20-1/paper661.html>.
- Liauw, T. T., & Genoni, P. (2017). A Different shade of green: A Survey of Indonesian higher education institutional repositories. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, 4(0), 1–26. <https://doi.org/10.7710/2162-3309.2136>
- Loan, F. A., & Shah, U. Y. (2020). Global electronic thesis and dissertation repositories-collection diversity and management issues. *Insights: The UKSG Journal*, 33, 1–10. <https://doi.org/10.1629/UKSG.524>
- Madukoma, E., & Adekunle, A. P. (2024). Open access publishing. In *Encyclopedia of Libraries, Librarianship, and Information Science, First Edition, Four Volume Set*, 4(2025), 424–433. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95689-5.00244-3>
- Makhotina, N., & Pshenichnaya, E. (2021). The features of restricted access to information at European and East Asian Libraries. *Journal of Information Science Theory and Practice*, 9(3), 31–41. <https://doi.org/10.1633/JISTaP.2021.9.3.3>
- Marsh, R. M. (2015). The role of institutional repositories in developing the communication of scholarly research. *OCLC Systems and Services*, 31(4), 163–195. <https://doi.org/10.1108/OCLC-04-2014-0022>
- Mishra, D., & Kumar, R. (2023). Institutional repository: A Green access for research information. *Indian Journal of Information Sources and Services*, 13(1), 55–58. <https://doi.org/10.51983/ijiss-2023.13.1.3471>
- Neuendorf, K. A. (2018). Content analysis and thematic analysis. In *Advanced research methods for applied psychology* (pp. 211–223). Routledge.
- Nurdin, L., & Mukhlis, S. (2019).

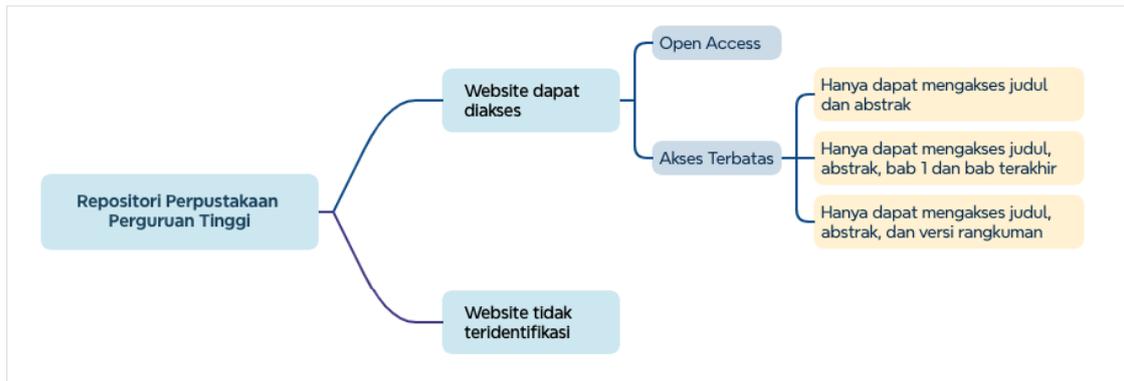
- Institutional repository as an information infrastructure for scholarly communication: An exploratory study in Indonesia. *Malaysian Journal of Library and Information Science*, 24(3), 101–114.  
<https://doi.org/10.22452/mjlis.vol24no3.6>
- Pratama, Y. B. (2018). *Kebijakan open access institutional repository: Studi multisitus pada 3 (tiga) perguruan tinggi negeri di Malang* [Bachelor's thesis, Universitas Brawijaya].  
<http://repository.ub.ac.id/view/year/2023.html>
- Priyanto, I. F. (2015). *Readiness of Indonesian academic libraries for open access and open access repositories implementation: A study on Indonesian open access repositories registered in OpenDOAR*. [Dissertation University of North Texas].
- Priyanto, I. F. (2022). The struggle of open access publishing: The Indonesian perspective. In Daniel Gelaw Alemneh (Ed.), *Handbook of Research on the Global View of Open Access and Scholarly Communications* (pp. 65–80). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9805-4.CH004>
- Prost, H., & Schöpfel, J. (2014). Degrees of openness: Access restrictions in institutional repositories. *D-Lib Magazine*, 20(7–8).  
<https://doi.org/10.1045/july2014-prost>
- Rafiq, M. (2022). Institutional repositories (IRs) in universities of Pakistan: Issues and emergent framework for remedies. *The Journal of Academic Librarianship*, 48(1), 1–11.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102480>
- Rinehart, A., & Cunningham, J. (2017). Breaking it down: A brief exploration of institutional repository submission agreements. *Journal of Academic Librarianship*, 43(1), 39–48.  
<https://doi.org/10.1016/j.acalib.2016.10.002>
- Rodliyah, U. (2023). Librarian's perception of open access repository policy in Islamic State University Indonesia. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 11(2), 227–240.  
<https://doi.org/10.24198/jkip.v11i2.46758>
- Safira, F. (2021). Kebijakan open access repositori institusi di perpustakaan perguruan tinggi: Kajian best practice studi literature. *Pustakaloka*, 13(1), 116–136.  
<https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v13i1.2457>
- Shukla, P., & Khan, A. M. (2014). Implications of institutional repositories on contributors' professional and publishing practices: A Survey. *The International Information & Library Review*, 46(3–4), 125–136.  
<https://doi.org/10.1080/10572317.2014.970061>
- Silva, E. G., Rego-Piva, L. M., & Guimarães, J. A. C. (2021). Scholarly communication offices as informative spaces in interection with univeristy libraries: Scope of action and offered services. *Scire*, 27(2), 77–86.  
<https://doi.org/10.54886/SCIRE.V27I2.4775>
- Silveira, J. I., & Vanz, S. A. S. (2023). Guidelines for deposit, access and use of research data: proposal based on the analysis of international university data repositories. *AtoZ*, 12, 1-17.  
<https://doi.org/10.5380/ATOZ.V12I0.87331>
- Stern, D. (2014). Student embargoes within institutional repositories: Faculty early transparency concerns. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, 2(2), 1–9.  
<https://doi.org/10.7710/2162-3309.1080>
- Tapfuma, M. M., & Hoskins, R. G. (2019). Open science disrupting the status quo in academic libraries: A perspective of Zimbabwe. *Journal of Academic Librarianship*, 45(4), 406–412.  
<https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.05.005>
- Ukwoma, S. C., & Ngulube, P. (2019). Obstacles to the utilization of institutional repositories by academics in

higher education in Nigeria. *Webology*,  
16(1), 138–150.  
<https://doi.org/10.14704/web/v16i1/a183>

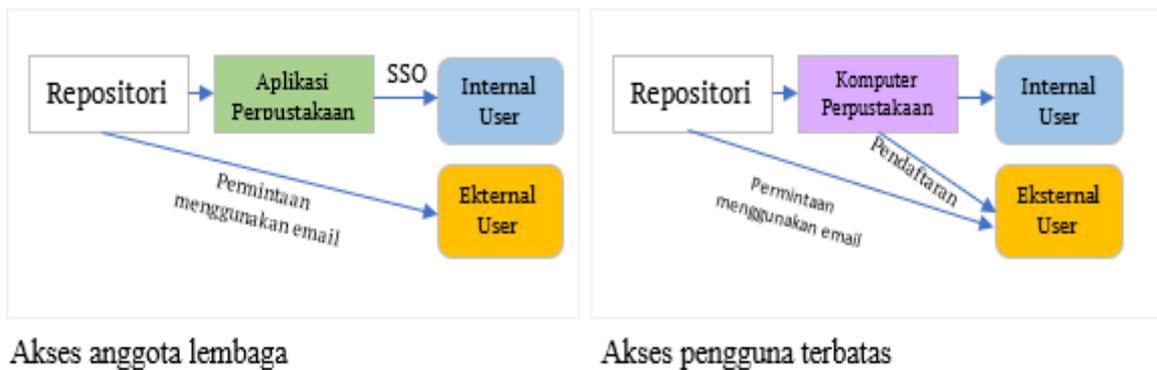
Vollmer, T. (2022). Creative commons and open access in an academic library: Implementation, tools, policy and education. In J. Coates, V. Owen & S. Reilly (Eds.), *Navigating Copyright for Libraries: Purpose and Scope* (pp. 378–404).  
<https://doi.org/10.1515/9783110732009-018>

Wilson, K., Huang, C. K., Montgomery, L., Neylon, C., Handcock, R. N., Ozaygen, A., & Roelofs, A. (2022). Changing the academic gender narrative through open access. *Information Research*, 10(3), 1–18.  
<https://doi.org/10.3390/publications10030022>

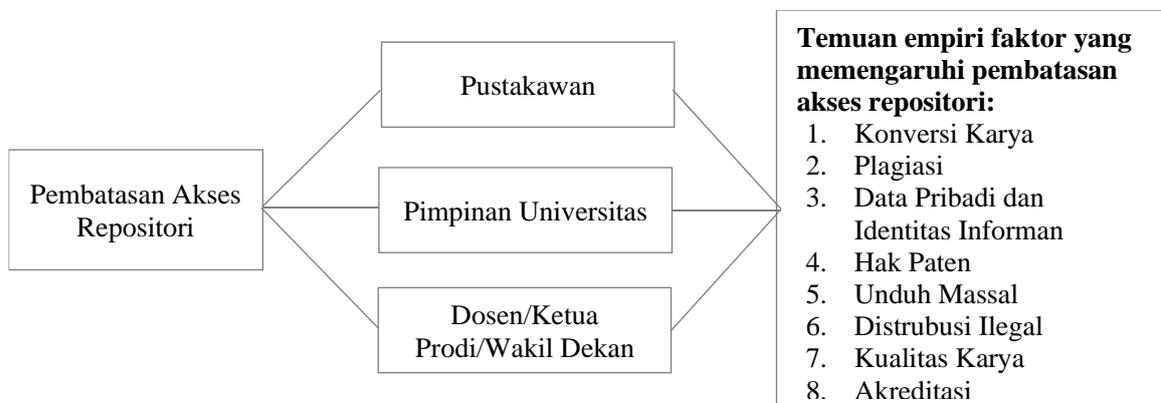
**DAFTAR GAMBAR**



Gambar 1 Kebijakan akses hasil temuan observasi konten website repositori



Gambar 2 Cara Akses Konten Repositori Perpustakaan A (kiri), B dan C (kanan)



Gambar 3 Temuan empiri faktor yang memengaruhi pembatasan akses repositori

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan penelitian

No	Nama (Samaran)	Perguruan Tinggi (Samaran)	Jabatan
1	Sa	Perpustakaan A	Kepala Perpustakaan
2	Du	Perpustakaan A	Staf IT Pengelola Repositori
3	Ti	Perpustakaan B	Kepala Perpustakaan
4	Em	Perpustakaan B	Staf IT Pengelola Repositori
5	Li	Perpustakaan C	Kepala Perpustakaan
6	Nam	Perpustakaan C	Staf Pelayanan Repositori

Sumber: Data primer diolah, tahun 2024

Tabel 2 Pembatasan akses repositori Perpustakaan A, B dan C

Perpustakaan	Tahun Pembatasan Akses	Kebijakan Akses
A	2019	Akses Anggota Lembaga
B	2014	Akses Pengguna Terbatas
C	2023	Akses Pengguna Terbatas

Sumber: Data primer diolah, tahun 2024

Tabel 3 Usulan kebijakan akses repositori dalam rapat akademik

Perpustakaan	Usulan dalam rapat			Kebijakan Akses
	Pustakawan	Wakil rektor akademik	Dosen/Kaprodi/Wakil dekan akademik	
A	Open access	Open access	Pembatasan akses	Akses anggota lembaga
B	Open access	Pembatasan akses	Pembatasan akses	Akses pengguna terbatas
C	Open access	Pembatasan akses	Pembatasan akses	Akses pengguna terbatas

Sumber: Data primer diolah, tahun 2024